

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta beriring salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar.

Laporan Keuangan RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.

Penulisan Laporan Keuangan RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2018.

Tersusunnya Laporan Keuangan RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar tahun anggaran 2018 ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan laporan keuangan ini diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 03 Januari 2019  
Direktur RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM  
Batusangkar

**dr. AFRIZAL HASAN**  
Nip. 197605292006041008

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA SATUAN KERJA  
RSUD. PROF.DR.M.A.HANAFIAH SM BATUSANGKAR**

Laporan Keuangan RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batusangkar, 03 Januari 2019  
Direktur RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM  
Batusangkar

**dr. AFRIZAL HASAN**  
Nip. 19760529 200604 1 008

DAFTAR ISI

	hal
BUKU I	
KATA PENGANTAR	1
LEMBARAN PERTANGGUNGJAWABAN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA KEUANGAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I       PENDAHULUAN	5
1.1   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3   Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
 BAB II       EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD SKPD	8
2.1   Ekonomi Makro	8
2.2   Kebijakan Keuangan	8
2.3   Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	9
 BAB III       IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
3.1   Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	11
3.2   Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	11
 BAB IV       KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1   Entitas Ekuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan	12
4.2   Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3   Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
 BAB V       PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
5.1   Laporan Realisasi Anggaran	16
5.2   Laporan Neraca	21
5.3   Laporan Opersional	31
5.4   Laporan Perubahan Ekuitas	35
 BAB VI       PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	37
BAB VII       PENUTUP	39
 LAMPIRAN	
Rekap Barang Ke Neraca	
Piutang	
Utang	
Persediaan	
Daftar Penyusutan Aset	
SK Penghapusan Aset	
Rekonsiliasi Keuangan	
Rekonsiliasi Aset	
Aset Ekstra Komptabel	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Beban Dibayar Dimuka	

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1	Rincian Pendapatan-LRA 16
Tabel 2	Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017 17
Tabel 3	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017 17
Tabel 4	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017 18
Tabel 5	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 19
Tabel 6	Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017 19
Tabel 7	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017 20
Tabel 8	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2017 20
Tabel 9	Rincian Kas di BLUD Tahun 2018 21
Tabel 10	Rincian Piutang Tahun 2018 22
Tabel 11	Rincian Persediaan Tahun 2018 22
Tabel 12	Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 23
Tabel 13	Komponen Penambah Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 24
Tabel 14	Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 24
Tabel 15	Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 25
Tabel 16	Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 26
Tabel 17	Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 26
Tabel 18	Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 27
Tabel 19	Perhitungan Mutasi KDP per 31 Desember 2018 27
Tabel 20	Rincian Penyusutan Aset Tetap 28
Tabel 21	Metode Penyusutan Aset Tetap 28
Tabel 22	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 28
Tabel 23	Rincian Kewajiban Jangka Pendek 30
Tabel 24	Rincian Utang jangka Pendek Lainnya 31
Tabel 25	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO Tahun 2018 32
Tabel 26	Rincian Beban Tahun 2018 32
Tabel 27	Rincian Surplus/Defisit LO Tahun 2018 34
Tabel 28	Rincian Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2018 35
Lampiran 1	Rekap Barang Ke Neraca
Lampiran 2	Piutang
Lampiran 3	Utang
Lampiran 4	Persediaan
Lampiran 5	Daftar Penyusutan Aset
Lampiran 6	SK Penghapusan Aset
Lampiran 7	Aset Ekstra Komptabel
Lampiran 8	Rekonsiliasi Keuangan
Lampiran 9	Rekonsiliasi Aset
Lampiran 10	Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran 11	Beban Dibayar Dimuka

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode tahun berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan & Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD PROF.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar ;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD ini meliputi penjelasan rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Yang dibahas dalam bentuk bab dengan sistematika pembahasan.

KATA PENGANTAR  
LEMBARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
NERACA KEUANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1	Entitas Ekuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan
4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	a. Pendapatan      c. Aset      e. Ekuitas
	b. Belanja      d. Kewajiban
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1	Laporan Realisasi Anggaran
5.2	Laporan Neraca
5.3	Laporan Operasional
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII	PENUTUP

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

Menurut Imamudin (2007;67) pembangunan dibidang ekonomi merupakan persoalan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 pembangunan nasional dikonsentrasikan pada tiga strategi utama yaitu :

- a. Mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pro-growth)
- b. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- c. Meningkatkan pemantapan stabilitas ekonomi

Dalam rangka mewujudkan tiga hal diatas beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah seperti berupaya untuk meningkatkan investasi, penyederhanaan perizinan berinvestasi, penyempurnaan administrasi dan sistem perpajakan, penyederhanaan kepastian, perbaikan iklim ketenagakerjaan, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kapasitas hukum dalam investasi dan berusaha, serta penanganan Peraturan Daerah yang cenderung menghambat.

Dengan kalimat awal tersebut selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2010, dan potensi apa yang ada di Kabupaten Tanah Datar guna mencapai ketiga tujuan utama pembangunan ekonomi diatas.

Perekonomian Tanah Datar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perekonomian nasional. Selama kurun waktu Tahun 2003 – 2007 perekonomian Kabupaten Tanah Datar masi didominasi oleh sektor pertanian baru kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dimana kontribusi sektor pertanian adalah 37.89% dari PDRB.

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang tergambar melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp. 2.338.67 Milyard naik sebesar Rp. 138.16 milyar dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar diperkirakan sebesar 6.28% angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2007 yang hanya sebesar 5.99%. Dengan kondisi tersebut maka secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Datar tahun 2008 – 2009 relatif lebih stabil.

#### **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan (financial sharing) antara Pusat-Daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan



ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu implikasi langsung dari adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah adalah adanya kebutuhan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut namun di satu sisi Pemerintah Daerah mempunyai sumber keuangan yang sangat terbatas. Dalam konsep Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan yang dominan sedangkan subsidi atau transfer dana dari Pemerintah Pusat menjadi sumber penerimaan pendukung. Namun demikian kenyataannya pada saat ini hampir seluruh Pemerintah Daerah peranan PAD untuk membiayai pembangunan relatif kecil yaitu kurang dari 10%.

Masalah kemampuan keuangan daerah memang merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Disatu pihak dengan prinsip otonomi daerah undang-undang mewajibkan suatu daerah mengurus rumah tangganya sendiri baik untuk rutin maupun pembangunan, tetapi dilain pihak daerah mempunyai keterbatasan potensi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah sehingga urusan rumah tangga daerah hampir seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah otonomi juga menghadapi permasalahan dibidang kemampuan keuangan, yang disebabkan terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang syah. Peningkatan pendapatan dilakukan dengan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah

### **2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

Indikator utama dalam menganalisis pembangunan ekonomi daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Selain itu indikator ini mengindikasikan sejauh mana aktivitas perekonomian telah meningkatkan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Indikasi ini tersirat dalam angka pertumbuhan output karena pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi ini adalah tingkat pertumbuhan angka-angka pendapatan daerah dan indikator ekonomi makro lainnya.

Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 RSUD Batusangkar adalah satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut :

- Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan penunjang non medis.
- Penyelenggaraan pelayanan medis.
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Penyelenggaraan pendataan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan fungsinya RSUD mempunyai kewenangan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan berupaya melakukan peningkatan Mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**RSUD. PROF.DR.M.A.HANAFIAH SM BATUSANGKAR**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar sebesar 78,19 % dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan	
			Rp.	%
1	Pendapatan	55.000.000.000,00	43.003.023.075,00	78,19
2	Belanja Operasi	76.055.763.325,00	65.168.240.386,00	85,68
3	Belanja Modal	38.871.954.174	18.119.371.847,00	46,61
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	169.679.866,00	150.902.850,00	88,93
B.	Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa , Rumah Sakit Paru – Paru / Rumah Sakit Mata			
	1. Pembangunan Rumah Sakit	30.516.624.174,00	11.316.953.846,00	37,08
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan alat kedokteran umum	3.432.750.000,00	3.281.803.401,00	95,60
C.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Penyediaan Biaya Opearsional dan Pemeliharaan	58.761.111.825,00	46.680.293.457,00	79,44

**3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET**

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mencapai target dari program yang telah direncanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah pengguna anggaran pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu RSUD. Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual dalam laporan operasional dan neraca serta basis kas dalam laporan arus kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi , tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah :

##### **A. PENDAPATAN**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **B. BELANJA**

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

##### **C. ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir.

**b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca SKPD/ PPKD per 31 Desember 2011 pada harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

**KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

Kebijakan Penyusutan aktiva tetap sebagai konsekuensi penggunaan aktiva agar tercapai keseragaman metode sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line Methode).

Menurut metode ini , beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aktiva tetap) dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

**Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi/Restorasi dijasikan seperti Tabel Berikut :**

No.	Kelompok Harta Berwujud	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Volume pekerjaan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin; a. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	>20% s.d 50%  >50%	2 tahun  3 tahun

	b. Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	>75%	2 tahun
2	Gedung dan Bangunan;	Renovasi/ Restorasi	>30% s.d 65%  >65%	3 tahun  6 tahun
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Renovasi/ Restorasi	>50%	5 tahun
4	Aktiva Tetap Lainnya;	Renovasi/ Restorasi	>50%	5 tahun

**Pengelompokkan Aktiva Tetap Berwujud dan umur Ekonomis  
Atau Umur Penggunaan Aktiva tetap Tetap untuk Perhitungan Penyusutan**

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	a Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	b Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;		
	a. Jalan, Irigasi dan jaringan	5 tahun	20 %
	b. Jembatan	20 tahun	5%
4	Aktiva tetap tetap lainnya;	7 tahun	20 %

Aktiva tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aktiva tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aktiva tetap dan akun Diinvestasikan dalam aktiva tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aktiva tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aktiva tetap.

**Untuk aktiva tetap yang dibeli pada tahun anggaran berjalan ( $X_n$ ) disusutkan mulai tahun berikutnya ( $X_{n+1}$ )**

**c. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap.

**D. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dari kontrak yang mengikat peraturan perundang-undangan.

## **E. EKUITAS**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas diklasifikasikan menjadi Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

.

BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	43.003.023.075	53.338.065.997,00

Realisasi Pendapatan-LRA RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **43.003. 023.075,00** dan Rp. **53.338.065.997,00**.

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar selama Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.  
Rincian Pendapatan-LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
✓ Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	170.000.000,00	167.624.000,00	119.061.000,00
✓ Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	256.000.000,00	224.065.800,00	212.827.300,00
✓ Pendapatan Instalasi Rawat Inap	1.400.000.000,00	1.101.451.226,00	1.322.055.500,00
✓ Pendapatan Instalasi Rawat Intensif ( ICU )	15.000.000,00	15.300.000,00	14.925.000,00
✓ Pendapatan Instalasi Bedah Sentral	170.000.000,00	123.600.000,00	166.600.000,00
✓ Pendapatan Instalasi Laboratorium	950.000.000,00	798.136.200,00	840.603.000,00
✓ Pendapatan Instalasi Radiologi	92.000.000,00	197.211.500,00	92.044.500,00
✓ Pendapatan Instalasi Rehab Medik	25.000.000,00	34.078.400,00	23.829.000,00
✓ Pendapatan Instalasi Medical Record	4.000.000,00	3.150.000,00	3.960.000,00
✓ Pendapatan Ambulance	100.000.000,00	106.804.400,00	105.743.500,00
✓ Pendapatan Oksigen	58.000.000,00	64.851.000,00	58.097.000,00
✓ Pendapatan klaim JKN	51.000.000.000,00	39.002.781.849,00	49.814.303.222,00
✓ Pendapatan Fungsional Lainnya	760.000.000,00	1.163.968.700,00	564.016.975,00
Jumlah	55.000.000.000,00	43.003.023.075,00	53.338.065.997,00



Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2018 sebesar Rp. **43.003.023.075,00** atau **78,19 %** dari target sebesar Rp. **55.000.000.000,00**.

5.1.2	BELANJA	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		83.287.612.233,00	86.395.370.670,00

Belanja adalah semua pengeluaran RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar selama Tahun Anggaran 2018 yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar , baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **83.287.612.233,00** dan Rp. **86.395.370.670,00** adalah rincian sebagai berikut.

Tabel. 2  
Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
1.	Belanja Operasi	76.055.763.325,00	65.168.240.386,00	67.112.470.793,00
2.	Belanja Modal	38.871.954.174,00	18.119.371.847,00	19.282.899.877,00
Jumlah		114.927.717.499,00	83.287.612.233,00	86.395.370.670,00

5.1.2.1	Belanja Operasi	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		65.168.240.386,00	67.112.470.793,00

Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp. **65.168.240.386,00** dan Rp. **67.112.470.793,00** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dengan uraian sebagai berikut.

Tabel. 3  
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	22.524.864.500,00	21.857.658.679,00	21.322.031.490,00
Belanja Barang dan Jasa	53.530.898.825,00	43.310.581.707,00	45.790.439.303,00
Jumlah	76.055.763.325,00	65.168.240.386,00	67.112.470.793,00

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		21.857.658.679,00	21.322.031.490,00

Realisasi Belanja pegawai Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp. **21.857.658.679,00** dan Rp. **21.322.031.490,00** terdiri dari dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel. 4**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017**

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Gaji Pokok PNS	13.879.876.525,00	13.785.222.731,00	13.739.446.480,00
Tunjangan Keluarga	1.356.688.700,00	1.338.562.954,00	1.239.587.012,00
Tunjangan Jabatan	128.600.000,00	128.600.000,00	122.220.000,00
Tunjangan Fungsional	1.558.325.500,00	1.556.175.000,00	1.348.270.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	177.102.375,00	176.560.000,00	177.835.000,00
Tunjangan Beras	825.425.600,00	813.638.698,00	824.356.860,00
Tunjangan PPH	6.281.300,00	4.932.570,00	15.193.632,00
Pembulatan Gaji	190.600,00	187.766,00	194.546,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.429.667.400,00	1.416.943.610,00	1.292.748.960,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	7.280.000,00	6.720.000,00	5.040.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.947.500.000,00	1.912.500.000,00	1.725.750.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	722.926.500,00	717.615.350,00	722.665.000,00
Jumlah	22.524.864.500,00	21.857.658.679,00	21.322.031.490,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **21.866.265.881,00** kemudian disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. **8.607.202,00** karena adanya kelebihan gaji pembayaran tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada pegawai RSUD tahun 2018 .

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		43.310.581.707,00	45.790.439.303,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp **43.310.581.707,00** dan Rp. **45.790.439.303,00** merupakan belanja barang dan jasa dalam kelompok belanja langsung dengan uraian sebagai berikut.

Tabel. 5

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Lepas	177.367.000,00	150.902.850,00	346.594.993,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.353.531.825,00	43.159.678.857,00	45.443.844.310,00
Jumlah	53.530.898.825,00	43.310.581.707,00	45.790.439.303,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **43.310.581.707,00** atau 80,91 % dari anggaran sebesar Rp. **53.530.898.825,00**.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama tahun 2018 ini merupakan pengadaan barang dan jasa, dalam rangka untuk menunjang program dan kegiatan RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang dialokasikan pada Belanja Langsung.

5.1.2.2	Belanja Modal	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		18.119.371.847,00	19.282.899.877,00

Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal BLUD dengan uraian sebagai berikut.

Tabel. 6

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	7.476.486.400,00	6.133.073.001,00	14.340.091.789,00
Belanja Gedung dan Bangunan	31.395.467.774,00	11.986.298.846,00	4.917.447.008,00
Belanja Aset Lainnya			25.361.000,00
Jumlah	38.871.954.174,00	18.119.371.847,00	19.282.899.877,00

5.1.2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		6.133.073.001,00	14.340.091.789,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin di lingkungan BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **6.133.073.001,00** dan Rp. **14.340.091.789,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 7

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
BM Pengadaan Kendaraan Bermotor			595.380.000,00
BM alat kantor dan Rumah Tangga	864.265.000,00	580.021.500,00	1.240.967.950,00
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.572.221.400,00	4.667.442.926,00	12.222.769.964,00
BM DED Poliklinik	860.000.000,00	722.610.075,00	
BM peralatan Workshop / Perbengkelan			22.773.875,00
BM Lampu solar Energy			258.200.000,00
BM Elektronik lainnya	180.000.000,00	162.998.500,00	
Jumlah	7.476.486.400,00	6.133.073.001,00	14.340.091.789,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **6.133.073.001,00** atau **82,03** % dari nilai anggaran sebesar Rp **7.476.486.400,00**.

5.1.2.2.2	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		11.986.298.846,00	4.917.447.088,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan di lingkungan BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **11.986.298.846,00** dan Rp. **4.917.447.088,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 8

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
BM Pengadaan Bangunan Kesehatan	31.395.467.774,00	11.986.298.846,00	4.917.447.088,00
Jumlah	31.395.467.774,00	11.986.298.846,00	4.917.447.088,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **11.986.298.846,00** atau **38,18** % dari nilai anggaran sebesar Rp. **31.395.467.774,00**.

5.1.2.2.3	Belanja Aset Tetap lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
			25.361.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di lingkungan BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar tahun 2018 tidak ada dan tahun 2017 sebesar Rp. **25.361.000,00**.

5.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

5.2.1	ASET	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
		71.058.255.601,00	57.322.601.939,00

Aset pada BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **71.058.255.601,00** dan Rp. **57.322.601.939,00** terbagi menjadi:

5.2.1.1	Aset Lancar	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
		17.120.147.358,00	14.134.488.294,00

5.2.1.1.1	Kas	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
		100.337.243,00	3.777.607.625,00

Saldo Kas BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **100.337.243,00** dan Rp. **3.777.607.625,00** merupakan uang di Kas BLUD di Bank, Kas di Bendahara Penerima dan Kas di Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 9

Rincian Kas di BLUD Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Kas BLUD di Bank	75.294.115,00	3.712.291.361,00
b. Kas BLUD di Bendahara Penerima	16.099.500,00	16.495.800,00
c. Kas BLUD di Bendahara Pengeluaran	8.943.628,00	48.820.464,00
Jumlah	100.337.243,00	3.777.607.625,00

5.2.1.1.2	Piutang	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		12.577.477.908,00	5.902.354.489,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **12.577.477.908,00** dan Rp. **5.902.354.489,00**.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 10

Rincian Piutang Tahun 2018

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Piutang Pasien Umum	1.002.500,00	4.563.500,00
b. Piutang Pasien Jasa Raharja	5.223.000,00	17.826.000,00
c. Piutang BPJS	12.567.012.408,00	5.878.794.989,00
d. Piutang Pasien Rujukan Sawahlunto	4.240.000,00	1.170.000,00
Jumlah	12.577.477.908,00	5.902.354.489,00

Rincian Piutang Dijelaskan pada Lampiran.2  
Piutang pasien umum, jasa raharja dan piutang pasien rujukan sawahlunto adalah klaim bulan desember dan piutang BPJS yang terdiri dari klaim obat kronis, ambulance dan rawatan sejak bulan April sampai Desember.

5.2.1.1.3	Beban dibayar dimuka	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		16.250.000,00	31.250.000,00

Beban dibayar dimuka tahun 2018 sebesar Rp. **16.250.000,00** merupakan beban sewa untuk rumah dinas dokter spesialis sampai tahun 2019.  
Rincian Beban dibayar dimuka pada lampiran.4

,

5.2.1.1.4	Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		4.426.082.207,00	4.423.276.180,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **4.426.082.207,00** dan Rp. **4.423.276.180,00**.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 11

Rincian Persediaan Tahun 2018

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Persediaan Obat	2.518.551.207,00	2.687.739.703,00
b. Persediaan BHP	1.348.700.226,00	1.385.546.118,00
c. Persediaan Bahan Kimia	495.643.116,00	284.764.409,00
d. Persediaan Makan Pasien	3.239.058,00	6.999.951,00
e. Persediaan Bahan Habis Pakai Gizi	760.050,00	

f. Persediaan Cetak Rekam Medis	3.377.500,00	8.207.500,00
g. Persediaan Benda Pos (Materai)	174.000,00	687.000,000
h. Persediaan ATK	27.475.853,00	17.804.650,00
i. Persediaan bahan makan Petugas	68.118,00	65.480,00
j. Persediaan Bahan Kebersihan/CS dan Laundry	2.351.454,00	29.122.169,00
k. Bahan Penampungan Sampah	1.154.500,00	
l. Persediaan Gas Oksigen (O2)	2.170.000,00	70.000,00
m. Persediaan bahan Komponen Listrik	22.417.125,00	2.269.200,00

<b>Jumlah</b>	<b>4.426.082.207,00</b>	<b>4.423.276.180,00</b>
Rincian Persediaan Dijelaskan pada Lampiran.4		

<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>53.573.342.343,00</b>	<b>42.821.088.245,00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. **53.573.342.343,00** dan Rp. **42.821.088.245,00**, rincian pada tabel berikut.

Tabel. 12

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	174.800.000,00	0,00	0,00	174.800.000,00
Peralatan dan Mesin	51.042.107.805,00	6.140.473.001,00	794.254.275,00	56.388.326.531,00
Gedung dan Bangunan	23.387.763.786,00	12.142.644.846	12.397.642.146,00	23.132.766.486,00
Jalan, Jembatan, Irigasi, & Jaringan	2.873.705.850,00			2.873.705.850,00
Aset Tetap Lainnya	27.161.000,00			27.161.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		12.787.403.894,00		12.787.403.894,00
Jumlah	77.505.538.441,00	31.070.521.741,00	13.191.896.421,00	95.384.163.761,00

Pada Tahun 2018 juga dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sebesar Rp. 41.810.821.418,00 sehingga menghasilkan nilai aset tetap sebesar Rp. 53.573.342.343,00.

Penjelasan mengenai penambahan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel. 13**  
**Komponen Penambah Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018**

Uraian	Koreksi Pencatatan	Mutasi Antar SKPD	Belanja Modal	H I B A H	KAPI TALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah Penambah (Rp)
Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	-	-	6.133.073.001,00	-	6.275.000,00	1.125.000,00-	6.140.473.001,00
Gedung dan Bangunan	-	-	11.986.298.846,00	-	156.346.000,00-		12.142.644.846,00
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-		
Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	-	
Konstruksi Dalam Pengerjaan					747.839.973,00	12.039.563.921,00	12.787.403.894,00
Jumlah	-		18.119.371.847		754.114.973,00	12.040.688.921,00	31.070.521.741,00

Penjelasan mengenai pengurangan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel.14**  
**Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018**

Uraian	Koreksi Pencatatan	Mutasi Antar SKPD	Penghapusan	BM TIDAK KAPITALISASI	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah Pengurang (Rp)
Tanah	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	-	-	-	59.541.400,00	734.712.875,00	794.254.275,00
Gedung dan Bangunan	-	-	1.079.563.300,00		11.318.078.846,00	12.132.766.486,00
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan						
Jumlah			1.079.563.300,00	59.541.400,00	12.052.791.721,00	13.191.896.421,00



5.2.1.2.1	Tanah	31 Desember 2018	31 Desember
		(Rp)	2017
			(Rp)
		174.800.000,00	174.800.000,00

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 174.800.000,00 dan Rp. 174.800.000,00.

Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

5.2.1.2.2	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		56.388.326.531,00	51.042.107.805,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 56.388.326.531,00 dan Rp. 51.042.107.805,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 15

Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2018	51.042.107.805,00
Belanja Modal Tahun 2018	6.133.073.001,00
Non Belanja Modal yang diakui sebagai aset	6.275.000,00
Reklasifikasi	1.125.000,00
Total Penambahan	57.182.580.806,00
Mutasi Kurang	
BM yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap	59.541.400,00
Reklasifikasi	734.712.875,00
Total Pengurangan	794.254.275,00
Saldo per 31 Desember 2018	56.388.326.531,00

5.2.1.2.3	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		23.132.766.486,00	23.387.763.786,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. **23.132.766.486,00** dan Rp. **23.387.763.786,00**.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel. 16**

**Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2018	<b>23.387.763.786,00</b>
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Tahun 2018	11.986.298.846,00
Non belanja Modal yang diakui sebagai aset	156.346.000,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>12.142.644.846,00</b>
Mutasi Kurang	
Penghapusan	1.079.563.301,00
Reklasifikasi Aset	11.318.078.845,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>12.397.642.146,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>23.132.766.486,00</b>

5.2.1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		<b>2.873.705.850,00</b>	<b>2.873.705.850,00</b>

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. **2.873.705.850,00** dan Rp **2.873.705.850,00**.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel. 17**

**Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2018	<b>2.873.705.850,00</b>
Mutasi Tambah	0,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>0,00</b>
Mutasi Kurang	0,00
<b>Total Pengurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>2.873.705.850,00</b>

5.2.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	31 Desember	31 Desember
		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
		27.161.000,00	27.161.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BLUD RSUD Batusangkar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 27.161.000,00 dan Rp. 27.161.000,00 Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 18  
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2018	27.161.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Belanja Modal Tahun 2018	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	27.161.000,00

5.2.1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		12.787.403.894,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.12.787.403.894,00 yang merupakan pembangunan Gedung Poliklinik 4 Lantai yang belum selesai Pengerjaannya sampai AkhirTahun 2018. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 19

Perhitungan Mutasi KDP per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2018	0,00
Mutasi Tambah	12.042.713.921,00
Kapitalisasi ( Non Belanja Modal + Hutang BM Gedung Poliklinik )	747.839.973,00
Reklasifikasi	12.039.563.921,00
Saldo per 31 Desember 2018	12.787.403.894,00

Aset BLUD RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar tahun 2018 juga terdiri dari Aset Ekstra Komptabel. Aset Ekstra Komptabel Tahun 2018 adalah Sebesar Rp. 271.027.661. Rincian Aset Ekstra Komptabel dijelaskan dalam lampiran 9.

5.2.1.2.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		(41.810.821.418,00)	(34.684.450.196,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. (41.810.821.418,00) dan Rp. (34.684.450.196,00). Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2017 untuk masing-masing jenis aset uraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 20  
Rincian Penyusutan Aset Tetap 2018

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 34.631.605.709,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 5.775.232.360,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 1.403.983.349,00
5.	Aset Tetap Lainnya	-
	JUMLAH	Rp. 41.810.821.418,00

Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp. **41.810.821.418,00** adalah nilai akumulasi penyusutan aset tetap RSUD Batusangkar sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, dimana metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel. 21  
Metode Penyusutan Aset Tetap

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	a Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	b Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 tahun	20 %
4	Aktiva tetap tetap lainnya;	7 tahun	20 %

5.2.1.3	Aset Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		364.765.900,00	367.025.400,00

Aset Lainnya tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2018 sebelum dikurangi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp. **394.445.600,00** dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel. 22  
Mutasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
- Aset Lain-lain (AT Tak Berwujud)	607.709.000,00	149.102.500,00		756.811.500,00
- Aset lain-lain	2.400.000,00			2.400.000,00
Jumlah	610.109.000,00			759.211.500,00

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)

Penjelasan mengenai penambahan nilai aset tetap lainnya, disajikan pada tabel berikut.

<b>5.2.1.3.1</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>756.811.500,00</u>	<u>607.709.000,00</u>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 756.811.500,00 dan Rp 607.709.000,00.

<b>5.2.1.3.2</b>	<b>Aset lain-lain</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>2.400.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>

<b>5.2.1.3.4</b>	<b>Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>394.445.600,00</u>	<u>243.083.600,00</u>

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. **394.445.600,00** dan Rp.**243.083.600,00**.

<b>5.2.2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>19.772.757.412,00</u>	<u>98.843.381.365,00</u>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>19.772.757.412,00</u>	<u>98.843.381.365,00</u>
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
		<u>108.618.642,00</u>	<u>87.686.667,00</u>

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2018 adalah sebesar Rp. **108.618.642,00** . Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sewa ATM Bank Nagari, BRI, BNI, Kantor Kas Bank Nagari dan Gedung Koperasi Syariah Pegawai RSUD Batusangkar yang dibayar untuk jangka waktu 2 sampai 5 tahun.

5.2.2.1.2	Utang Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		18.919.448.797,00	7.902.187.419,00

Utang Beban BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 Rp. **18.919.448.797,00** di jelaskan dalam tabel berikut :

Tabel. 23

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1. Utang Belanja Obat	5.837.795.589,00	2.268.988.970,00
2. Utang Belanja BHP	2.471.713.109,00	893.508.218,00
3. Utang Belanja BahanLaboratorium	1.788.790.473,00	414.891.036,00
4. Utang Belanja Makan Pasien	85.530.824,00	151.195.000,00
5. Utang Jasa Pelayanan BPJS	5.192.099.251,00	3.439.333.424,00
6. Utang Jasa Pelayanan Umum	308.495.510,00	65.641.960,00
7. Utang Jasa Pelayanan Pasien Rujukan Sawahlunto	5.804.000,00	6.140.000,00
8. Utang Jasa Pelayanan Jasa Raharja	35.795.400,00	18.266.200,00
9. Utang jasa Pelayanan ( insentif sopir dan perawat pengantar )	10.371.250,00	
10. Utang Belanja kalibrasi Alat Kesehatan	148.966.400,00	
11. Utang Belanja Cetak medis	19.900.000,00	64.270.000,00
12. Utang Belanja Bahan Habis Pakai Gizi	17.863.500,00	8.996.400,00
13. Utang Jasa Dewan Pengawas	82.529.919,00	
14. Utang Jasa Lainnya	111.410.000,00	
15. Utang Belanja ATK	139.698.903,00	67.830.450,00
16. Utang Biaya Cetak dan Penggandaan	59.818.000,00	
17. Utang Bacaan Perundang undangan	1.650.000,00	
18. Utang Makan dan Minum Rapat	16.098.500,00	
19. Utang Makan dan Minum Tamu	4.261.400,00	
20. Utang Biaya makan Minum Kegiatan	10.732.150,00	
21. Utang Belanja Makan Pegawai	324.277.995,00	243.885.031,00
22. Utang Biaya Pemeliharaan Genset	6.412.505,00	
23. Utang pemeliharaan dan suku Cadang Kendaraan Dinas	67.860.000,00	
24. Utang Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.576.000,00	
25. Utang Pemeliharaan IT	11.767.500,00	
26. Utang Biaya Penyediaan Penampungan Sampah Sementara	26.000.800,00	
27. Utang Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	61.006.308,00	
28. Utang Biaya Bahan Bakar	44.076.800,00	
29. Utang Biaya Langganan Media	2.660.000,00	
30. Utang Jasa Tenaga Ahli Referal	14.400.000,00	
31. Utang jasa Perawat Jaga	4.140.000,00	
32. Utang Jasa Dokter Jaga	16.560.000,00	
33. Utang Jasa Dokter WKDS	7.500.000,00	
34. Utang Biaya Jasa Tenaga Kerja dan Perjanjian Kerja ( BLUD )	321.081.402,00	

35. Utang Biaya Jasa Tenaga kebersihan / CS	342.775.872,00	
36. Utang Biaya Tenaga Kerja Outsourcing	427.138.668,00	100.204.200,00
37. Utang Biaya pemusnahan Limbah B3	378.595.000,00	72.275.000,00
38. Utang Belanja Air	21.413.000,00	8.746.850,00
39. Utang Belanja Telfon	3.378.525,00	2.264.383,00
40. Utang Belanja Listrik	54.551.450,00	49.469.100,00
41. Utang Biaya Pembelian Gas Oksigen dan Nitrogen	86.205.000,00	27.100.000,00
42. Utang Biaya Sewa Tanah	9.260.274,00	
43. Utang Biaya Kontribusi	3.375.000,00	
44. Utang Biaya Promkes	154.092.400,00	
45. Utang Biaya Izin Radiasi		950.000,00
46. Utang Jasa Pelayanan Jampersal	135.020.120,00	
<b>Jumlah</b>	<b>18.919.448.797,00</b>	<b>7.902.187.419,00</b>

Rincian Utang Usaha dijelaskan dalam lampiran 2.

**Tabel. 24**

**Rincian utang Jangka Pendek lainnya**

<b>5.2.2.1.2</b>	<b>Utang Jangka Pendek lainnya</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>744.689.973,00</b>	

Utang jangka pendek lainnya pada RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 sebesar Rp. **744.689.973,00** disebabkan selisih realisasi fisik dengan realisasi keuangan karena putus kontrak pembangunan gedung poliklinik RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar.

<b>5.2.3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>51.285.498.189,00</b>	<b>(41.520.779.426,00)</b>

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp **51.285.498.189,00** dan Rp **(41.520.779.426,00)**.

**5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

<b>5.3.1</b>	<b>Pendapatan-LO</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>49.657.214.519,00</b>	<b>50.490.716.490,00</b>

Pendapatan-LO untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar **49.657.214.519,00** dan Rp **50.490.716.490,00** dengan rincian sebagai berikut .

**Tabel. 25**

**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan–LO Tahun 2018**

Uraian	Pendapatan 2018 (Rp)	Pendapatan 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pasien Umum	2.832.711.526,00	2.941.105.900,00	(108.394.374,00)
Pendapatan Pasien BPJS	45.690.999.268,00	47.026.970.815,00	(1.335.971.547,00)
Pendapatan Lainnya	1.133.503.725,00	522.639.775,00	610.863.950,00
Jumlah	49.657.214.519,00	50.490.716.490,00	(833.501.971,00)

Pendapatan-LO pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp **(833.501.971,00)** atau **1,65 %**.

<b>5.3.2      Beban</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>83.754.661.252,00</b>	<b>76.094.388.454,00</b>

Beban untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar **83.754.661.252,00** dan Rp **76.094.388.454,00** dengan rincian sebagai berikut .

**Tabel. 26**

**Rincian Beban Tahun 2018**

Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai – LO	21.857.658.679,00	21.322.031.490,00	535.627.189,00
Beban Persediaan	20.422.006.410,00	19.174.449.042,00	1.247.557.368,00
Beban Jasa	31.209.983.706,00	27.278.184.910,00	3.931.798.796,00
Beban Pemeliharaan	1.572.201.763,00	1.034.957.053,00	537.244.710,00
Beban Perjalanan Dinas	820.971.679,00	865.059.474,00	(44.087.795,00)
Beban Penyusutan	7.720.477.015,00	6.298.164.685,00	1.422.312.330,00
Beban Amortisasi	151.362.000,00	121.541.800,00	29.820.200,00
Jumlah	83.754.661.252,00	76.094.388.454,00	7.660.272.798,00

Beban pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Beban Tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar **7.660.272.798,00** atau **10,07 %**.

<b>5.3.2.1      Beban Pegawai – LO</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>21.857.658.679,00</b>	<b>21.322.031.490,00</b>



Beban Pegawai–LO untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp. **21.857.658.679,00** dan Rp **21.322.031.490,00**.

5.3.2.2	Beban Persediaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		20.422.006.410,00	19.174.449.042,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp **20.422.006.410,00** dan Rp **19.174.449.042,00**.

Beban Persediaan      Persediaan Tahun 2017                      Rp.    4.423.276.180,00  
                                    Tahun 2018  
                                    sebesar Rp  
**20.422.006.410,00**  
                                    dapat dijelaskan  
                                    dengan rincian  
                                    sebagai berikut:a.

b.	Belanja Barang dan Jasa menjadi Persedian	
-	Utang Belanja Persediaan 2017	(4.128.847.355,00)
-	Belanja Persediaan 2018	Rp. 13.694.877.291,00
-	Utang Belanja Persediaan 2018	10.858.782.501,00
c.	Persediaan Tahun 2018	Rp. (4.426.082.207,00)
	Beban Persediaan Tahun 2018	Rp. <b>20.422.006.410,00</b>

5.3.2.3	Beban Jasa	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		31.209.983.756,00	27.278.184.910,00

Beban Jasa untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp **31.209.983.706,00** dan Rp **27.278.184.910,00**.

Beban Jasa Tahun 2018 sebesar Rp **31.209.983.756,00** terdiri dari rincian sebagai berikut:

-	Belanja Barang Jasa 2018	Rp. 27.512.708.757,00
-	Utang Belanja Barang Jasa 2017	Rp. (3.773.340.064,00)
-	Utang Belanja Barang Jasa 2018	7.779.083.891,00
-	Biaya di bayar di muka 2017	31.250.000,00
	Biaya di bayar di muka 2018	(16.250.000,00)
-	Pengembalian Belanja Barang Jasa BLUD	(8.595.328,00)
-	Belanja barang jasa Yang Diakui sebagai Aset	(314.873.500,00)
	Jumlah	Rp. <b>31.209.983.756,00</b>

5.3.2.4	Beban Pemeliharaan	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		1.572.201.713,00	1.034.957.053,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp 1.572.201.713,00 dan Rp 1.034.957.053,00 dengan rincian sebagai berikut :

-	Beban Pemeliharaan 2018	Rp.	1.290.619.308,00
-	Utang Beban Pemeliharaan 2018	Rp.	281.582.405,00
	Jumlah	Rp.	1.572.201.713,00

5.3.2.5	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		820.971.679,00	865.059.474,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp 820.971.679,00 dan Rp 865.059.474,00.

5.3.2.6	Beban Penyusutan	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		7.720.477.015,00	6.298.164.685,00

Beban Penyusutan untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp 7.720.477.015,00 dan Rp 6.298.164.685,00.

5.3.2.7	Beban Amortisasi	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		151.362.000,00	121.541.800,00

Beban Amortisasi Tahun 2018 sebesar Rp 151.362.000,00 berasal dari Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2017.

5.3.3	Surplus/Defisit dari Operasi	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		(34.097.446.733,00)	(25.603.671.964,00)

Surplus/ Defisit dari Operasi 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp (34.097.446.733,00) dan Rp (25.603.671.964,00).

5.3.4	Surplus/Defisit LO	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		(34.097.446.733,00)	(25.603.671.964,00)

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp (34.097.446.733,00) dan Rp (25.603.671.964,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel. 27**  
**Rincian Surplus / Defisit LO Tahun 2018**

Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan - LO	49.657.214.519,00	50.490.716.490,00	(833.501.971,00)
Beban	83.754.661.252,00	76.094.388.454,00	7.660.272.798,00
Surplus /Defisit LO	(34.097.446.733,00)	(25.603.671.964,00)	(8.493.774.769,00)

**5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ( LPE )**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.4.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>(41.504.283.626,00)</b>	<b>(15.083.091.240,00)</b>

Ekuitas Awal untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp **(41.504.283.626,00)** dan Rp. **(15.083.091.240,00)**

<b>5.4.2</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>(34.097.446.733,00)</b>	<b>(25.603.671.964,00)</b>

Surplus/Defisit-LO untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp **(34.097.446.733,00)** dan Rp **(25.603.671.964,00)**.

**Tabel. 28**  
**Rincian Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2018**

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(4.233.975.789,00 )	(817.520.422,00 )

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah	(4.233.975.789,00 )	(817.520.422,00 )

5.4.3	Ekuitas Akhir	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		51.285.498.189,00	(41.504.283.626,00)

Ekuitas Akhir pada BLUD RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp **51.285.498.189,00** dan Rp **(41.504.283.626,00)** terdiri dari jumlah Ekuitas Awal dengan Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Ekuitas awal	(41.504.283.626,00)	(15.083.091.240,00)
b. Surplus/defisit-lo	(34.097.446.733,00)	(25.603.671.964,00)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
- Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	(4.233.975.789,00 )	(817.520.422,00 )
e. Kewajiban Untuk Di Konsolidasikan	131.121.204.337,00	0,00
Ekuitas akhir	51.285.498.189 ,00	(41.504.283.626,00)

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR**

Keberadaan Rumah Sakit Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar dimulai dari sebuah Klinik Pengobatan yang berdiri di Jalan S.Parman atas inisiatif seorang dokter berkebangsaan Belanda yang bekerja sebagai Dokter Pemerintah Belanda dan kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit yang didirikan pada tahun 1937 terletak berseberangan jalan dengan klinik pengobatan dengan luas bangunan  $\pm 739 \text{ M}^2$  dengan jumlah tempat tidur 45 buah terdiri dari Zall Anak 17 TT, Zall Kebidanan 18 TT dan Zall Penyakit Dalam 10 TT dengan tenaga yang terdiri dari 2 orang Dokter Umum dan 44 orang Paramedis.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka mulai dirintis pembangunan gedung terpisah yang berlokasi di Daerah Kecamatan Tanjung Emas Kenagarian Pagaruyung  $\pm 3 \text{ KM}$  dari tempat semula. Pembangunan Rumah Sakit pada lokasi yang baru dimulai pada tahun 1982 secara bertahap dengan berbagai upaya dari segenap unsur Pemerintah dan Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat melalui kegiatan gotong royong Manunggal Sakato dan lain-lain yang akhirnya pada tahun 1985 secara berangsur-angsur kegiatan pelayanan Rumah Sakit dapat pindah ke lokasi yang baru dan diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat Bapak Ir.H.AZWAR ANAS pada tanggal 12 November 1985 dengan status Rumah Sakit Type “D” dengan 75 TT.

Dengan berpindahnya kegiatan RSU Batusangkar ke lokasi yang baru, maka perkembangan dan kemajuan yang dialami RSU Batusangkar semakin meningkat seiring dengan perkembangannya melalui pembangunan gedung-gedung baru dan penambahan Sumber Daya Manusia dalam rangka memenuhi standar Rumah Sakit Type “C” dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 192/Menkes/ SL/II/1993 tanggal 26 April 1993 dan SK Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 29 April 1993 statusnya ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Type “C” yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI Bapak Prof.ADIYATMA, Mph

Dengan meningkatnya status Rumah Sakit Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar kemudian dibarengi dengan pembentukan Struktur Organisasi RSU Batusangkar melalui Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1994 tanggal 5 Desember 1994.

Berdasarkan perkembangannya kemudian pada tanggal 10 Desember 1996 melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 412/BTD/1996 dikukuhkan nama RSU Batusangkar menjadi RUMAH SAKIT Prof.DR.M.A HANAFIAH SM Batusangkar yang diambil dari nama tokoh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang telah mengabdikan dirinya dalam Ilmu Kedokteran pada Universitas Indonesia.

Seiring dengan perkembangan desentralisasi Otonomi Daerah kemudian struktur Rumah Sakit Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar berkembang dengan perubahan struktur baru yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003.

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Rumah Sakit Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar mempunyai tarif yang terjangkau oleh masyarakat dan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan seyogyanya pasien membawa surat rujukan dari Puskesmas, Klinik atau Praktek Dokter ke Rumah Sakit Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar, yang perlu diketahui oleh masyarakat pelayanan Rumah Sakit telah mencakup Pelayanan Spesialis 4 dasar dan 6 tambahan ( Bedah, Interne, Anak, Kebidanan, Mata, THT, Neurologi, Kesehatan Jiwa,Pataolgi Klinik dan Patalogi Anatomi).

**Visi, Misi dan Motto RSUD Prof DR M.A Hanafiah SM Batusangkar**

**VISI**

“Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Nasional”

**MISI**

“Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu Tinggi dan Profesional Dengan Mengutamakan Kepuasan Pasien”

**Motto**

“Mengutamakan Keselamatan, Kesembuhan, Kenyamanan dan Kepuasan Pasien Adalah Merupakan Kebahagiaan Kami”

## **BAB VII PENUTUP**

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan RSUD. Prof. DR. MAHanafiah SM Batusangkar, meliputi belanja operasional dan belanja modal terealisasi sebesar 97,51 %.
2. Belanja RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM pada tahun 2018 sebesar Rp. 83.287.612.233,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 65.168.240.386,00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 18.119.371.847,00,-

Batusangkar, 03 Januari 2019  
Direktur RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM  
Batusangkar

**dr. AFRIZAL HASAN**  
Nip. 19760529 200604 1 008